



DAMPAK KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PERTANIAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

Rynalto Mukiwihando
Politeknik Keuangan Negara STAN
wihando@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama Kali:
26 April 2020

Dinyatakan Diterima:
15 Juni 2020

Keywords :

Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi

JEL Classification Codes:
E62; H72; O47

ABSTRACT

One of the main economic policies of Indonesia government is to boost productivity in agriculture sector. This sector plays a vital role for sustainable development in a country, by providing food security. Unlike previous studies, this paper investigates the impact of specific allocated fund (DAK) in agriculture to economic growth in respected sector. Utilizing 38 municipals in East Java as the biggest rice producer province in Indonesia, this study argue that there is a positive effect of DAK in agriculture to GDP Growth in agriculture. This sectoral research implies to maintain this specific grant scheme implementation in this particularly primary sector to create sustainable development in Indonesia

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi mengenai manfaat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) telah beberapa kali dilakukan, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang berfokus pada dampak dari DAK secara sektoral. Studi seperti Maryati dan Endrawati (2010) melihat dampak DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat secara agregat. Sedangkan Setyawati (2007) juga melihat dari sisi makro untuk ruang lingkup yang lebih luas yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Penulis melihat bahwa studi yang lebih terinci terhadap kebijakan pemerintah dapat membantu merumuskan program kebijakan yang lebih spesifik di masa depan. Oleh karena itu, penelitian mengenai kontribusi kebijakan DAK Pertanian terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertanian penting untuk dilakukan.

Pengertian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK merupakan salah satu jenis transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di Indonesia. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran prioritas Nasional.

Dalam literatur keuangan negara, sesuai dengan namanya, DAK masuk dalam kategori bantuan spesifik (*specific grant*) atas bantuan bersyarat (*conditional grant*). Di dalam UU 33/2004, DAK diterjemahkan secara lebih sempit dari *specific grant* pada umumnya. Pengertian Dana Alokasi Khusus dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah Tertentu tersebut adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan agar dapat dikategorikan dalam program yang menjadi prioritas nasional maka harus dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan

Besaran alokasi DAK di masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum diformulasikan berdasarkan keadaan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk kriteria khusus

dihitung dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus serta Karakteristik daerah. Sedangkan kriteria terakhir yaitu kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

Sesuai ketentuan di atas, Dana Alokasi Khusus mempersyaratkan adanya Dana Pendamping yang besarnya paling tidak sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Penghitungan alokasi DAK terbagi dalam dua tahapan yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Alokasi DAK per daerah tersebut ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK tersebut, menteri teknis juknis penggunaan DAK.

Pada awalnya yang disediakan bagi daerah seluruhnya bersumber dari dana reboisasi (DR) yang dialokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan dana reboisasi. Di tahun tersebut, selain DAK DR terdapat 5 bidang DAK non-DR yaitu: pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan pengairan, prasarana pemerintah dan kelautan dan perikanan. Pada tahun berikutnya terdapat penambahan 1 bidang pada DAK Non-DR yaitu bidang pertanian. Perluasan terus dilakukan hingga pada tahun 2011 terdapat 19 bidang DAK Fisik dengan bidang pertanian salah satu di dalamnya yang dialokasikan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air, lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluh pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan.

Sejak tahun 2016 melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pola pendanaan berubah menjadi *proposal based*. Menurut Candra (2019), format *proposal based* diharapkan mampu menjadi jembatan pola *top down* (prioritas dan kemampuan nasional) dengan pendekatan *bottom-up* (sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah). Pada tahun ini pula kewajiban penyediaan dana pendamping ditiadakan. Pengalokasian DAK juga berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana dilakukan berdasarkan data teknis dari proposal daerah yang diverifikasi K/L teknis dengan mempertimbangkan kinerja penyerapan, cluster Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan penyesuaian batas maksimal dan minimal kenaikan dan total DAK per daerah. Ketentuan lenih lanjut juga mengatur bahwa seluruh daerah yang menyampaikan usulan memperoleh DAK dan seluruh daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan langsung

menerima DAK Afirmasi. Dalam aturan ini pula DAK terbagi menjadi 2 yaitu DAK fisik dan DAK nonfisik.

Peraturan terakhir mengenai Dana Alokasi Khusus ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020. Menurut Perpres ini, DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi: a. DAK Fisik Reguler; b. DAK Fisik Penugasan; dan c. DAK Fisik Afirmasi. DAK Fisik meliputi: a). pendidikan; b). kesehatan dan keluarga berencana; c). perumahan dan permukiman; d). industri kecil dan menengah; e). pertanian; f). kelautan dan perikanan; g). pariwisata; h). jalan; i). air minum; j). sanitasi; k). irigasi; l). pasar; m). lingkungan hidup dan kehutanan; n). transportasi perdesaan; o). transportasi laut; dan p). sosial.

Pengelolaan DAK Fisik mencakup: a). persiapan teknis; b). pelaksanaan; c). pelaporan; dan d). pemantauan dan evaluasi. Pemerintah Daerah, melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga. Kemudian Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan: a. pelaksanaan kegiatan; dan b. penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan.

Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap aspek teknis kegiatan dan keuangan. Sedangkan, menurut Perpres ini, Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap pencapaian keluaran dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan target dan sasaran keluaran yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dan dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di daerah oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh menteri/pimpinan lembaga, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

Secara garis besar tujuan dari program DAK adalah untuk mendukung realisasi program-program yang memiliki dampak yang signifikan bagi pemerintah daerah sehingga terdapat berbagai sektor vital yang didanai oleh program DAK, diantaranya adalah sektor pertanian. Target dari DAK Pertanian adalah meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, sehingga mendorong peningkatan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan adalah salah satu isu terpenting dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal ini disebabkan terpenuhinya kebutuhan pangan dari suatu daerah merupakan prasyarat penting kedaulatan otoritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Bahkan beberapa literatur juga mengedepankan aspek *food security* dalam melakukan perdagangan internasional pada sektor pangan di suatu negara. Hal ini dilakukan karena ketergantungan sektor pangan terhadap negara lain akan mendorong terganggunya kedaulatan otoritas negara di dunia internasional. Rahman, et.al (2008) berpendapat bahwa perlu dilakukan antisipasi ke depan dengan menjaga keberpihakan secara proporsional pada pembangunan sektor pertanian dan mencegah ketergantungan impor pangan yang dapat mengganggu kemandirian pangan. Sedangkan Hermawan (2017) menyatakan bahwa pemerintah memiliki kepentingan terhadap penguatan ketahanan pangan di masing-masing negara dengan mengintervensi pasar padi dan beras melalui kebijakan perdagangan internasional, baik berupa larangan ekspor maupun lisensi, dan kebijakan stabilisasi harga beras domestik.

Studi ini akan melihat hubungan antara alokasi DAK dan kontribusinya pada PDRB sektor pertanian di daerah lumbung padi terbesar di Indonesia yaitu provinsi Jawa Timur. Sampel yang digunakan adalah 38 daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Pengolahan data menggunakan analisis panel data dengan 114 observasi melalui alat bantu E-views. Variabel pendamping (dalam model) yang dipilih adalah variabel tingkat melek huruf sebagai representasi dari tingkat pendidikan. Sedangkan variabel tingkat kelahiran yang didampingi tenaga kesehatan adalah *proxy* dari sektor kesehatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh DAK Pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya dari sektor yang sama (pertanian). Sedangkan tujuan penelitian adalah menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh DAK Pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) sektor pertanian pada sampel terpilih.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Teori

Terdapat beberapa teori yang melandasi pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pertama, teori yang dikembangkan oleh Oates berdasarkan pemikiran sebelumnya oleh Hayek dan Musgrave. Teori Federalisme Fiskal menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh melalui

desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri Menurut Oates (1972), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini didasarkan bahwa pemerintah pada sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Hal ini juga didorong oleh proses pengambilan keputusan pada tingkat pemerintah lokal (kabupaten/kota) akan lebih menyerap aspirasi keragaman pilihan masyarakat lokal dan mendorong terjadinya efisiensi alokasi.

Teori Federalisme Fiskal dibagi menjadi dua perspektif. Perspektif pertama disampaikan oleh Hayek (1945) yang menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan secara desentralisasi akan lebih mudah, hal ini disebabkan pemanfaatan informasi yang efisien karena pemerintah daerah berada lebih dekat dengan rakyatnya. Pemikiran ini disebut juga dengan *knowledge in society*. Perspektif kedua dihasilkan oleh Tiebout (1956) yang berargumen bahwa pada level pemerintah daerah ada dimensi persaingan dan kompetisi (*shopping and competition*) dalam hal penyediaan barang publik yang sesuai dengan selera dan keinginan para individu dalam masyarakat. Hal ini tidak akan terjadi apabila penyediaan barang publik dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal akan menciptakan dampak positif bagi pemerintahan daerah terkait yang salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi. Dampak positif ini terjadi karena proses desentralisasi fiskal membuat pemerintah lebih mengetahui keinginan masyarakat lokal serta adanya hasrat pemerintah lokal untuk saling bersaing dalam memberikan layanan kepada publiknya masing-masing.

2.1. Penelitian terdahulu

Maryati dan Endrawati (2010) melakukan studi untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data PDRB atas harga konstan, realisasi PAD, DAU dan DAK kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam "Sumatera Barat dalam Angka" tahun 2004, 2005 dan 2006. Analisis data dengan menggunakan analisa regresi berganda. Hasil analisis membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap

pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan dan lain-lain. Yang berarti tidak boleh disalahgunakan digunakan untuk kegiatan diluar ketentuan.

Nuryadin dan Suharsih (2017) melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengalokasian DAK TA 2003-2013 dan menganalisis dampak alokasi DAK 2003 - 2013 terhadap berbagai indikator pembangunan di daerah kabupaten/kota. Desain transfer DAK merupakan permasalahan utama terkait pelaksanaan DAK. Selain itu, permasalahan-permasalahan juga terlihat dalam mekanisme pengalokasian DAK, yaitu dalam hal penetapan program dan kegiatan, penghitungan dan penggunaan, penganggaran dan penyaluran, pelaporan dan monitoring serta evaluasi DAK. DAK, sebagai salah satu jenis Dana Perimbangan, berdampak positif terhadap kemampuan fiskal daerah dan berperan dalam mengurangi tingkat kesenjangan fiskal antar Kabupaten/Kota selama periode tahun 2003-2007. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi DAK (secara total) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DAK belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, karena arah penggunaan DAK belum secara langsung digunakan untuk "membangun", namun hanya untuk "memelihara". Sehingga DAK dinilai belum cukup efektif untuk mencapai sasaran prioritas nasional.

Jolianis Koto (2016) melakukan studi untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemiskinan, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, dan pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Dengan data sekunder selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2010 – 2014 pada 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, disimpulkan bahwa: 1) PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2) DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 3) DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 4) PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 5) DAU berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 6) DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 7) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 8) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui

pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. 9) DAU berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. 10) DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

Setiyawati dan Hamzah (2007) menggunakan pendekatan analisis jalur hubungan antara PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Pengujian data dilakukan dari 2001 sampai dengan 2005 setelah adanya implementasi Undang-undang Otonomi Daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang telah diadministrasikan dengan baik dan telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Hasil pengujian secara langsung dengan regresi berganda menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hasil pengujian secara tidak langsung PAD terhadap kemiskinan adalah sebesar 9,66% dan pengangguran sebesar 16,95%, sedangkan DAU terhadap kemiskinan adalah sebesar 4,9% dan terhadap pengangguran sebesar 8,6%. Untuk DAK dan belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiyawati berargumen bahwa hal ini dikarenakan karakteristik DAK yang peruntukkannya cukup spesifik. Sedangkan untuk belanja pembangunan bisa dikarenakan adanya kebocoran maupun penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dewi et.al, dkk (2017) melakukan studi untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menggunakan data *time series* untuk Kota Bitung pada kurun waktu tahun 2005-2015 dan diolah berdasarkan metode analisis regresi berganda untuk pengujian analisis jalur yang digunakan. Hasil studi menunjukkan bahwa hubungan antara PAD, DAU, DAK terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah adalah hubungan negatif. Dimana penurunan 1 persen kemiskinan adalah kontribusi dari PAD sebesar 0.6216 persen, DAU sebesar 4,7930 persen dan sebesar DAK 0.2101 persen melalui Belanja Daerah Kota Bitung. Sedangkan secara keseluruhan diketahui bahwa jika terjadi kenaikan 1 persen pada

Belanja Daerah maka akan terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 0.1856 persen.

Dari berbagai hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Masih terdapat hasil yang beragam atas hasil penelitian antara DAK dan pertumbuhan ekonomi.
2. Belum ada penelitian yang melihat dampak dari DAK Pertanian
3. Belum ada studi yang menguji hubungan DAK dengan pertumbuhan secara sektoral khususnya sektor pertanian.

2.2. Pengembangan Hipotesa

Berdasarkan latar belakang teori federalisme fiskal yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan desentralisasi fiskal. Hal ini dapat dimplikasikan bahwa penerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian. Maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Produk Domestik Bruto.

H_1 : Ada hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Produk Domestik Bruto.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian regresi linier berganda untuk data panel dalam melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.1. Sampel

Studi ini akan menggunakan data pada beberapa daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagai lumbung padi terbesar di Indonesia

Sampel dalam penelitian ini adalah 38 daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Daerah dimaksud adalah: Bangkalan, Banyuwangi, Batu (Kota), Blitar (kab), Blitar (kota), Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri (kab), Kediri (kota), Lamongan, Lumajang, Madiun (kab), Madiun (kota), Magetan, Malang (kab), Malang (kota), Mojokerto (kab), Mojokerto (kota), Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan (kab), Pasuruan (kota), Ponorogo, Probolinggo (kab), Probolinggo (kota), Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Surabaya, Trenggalek, Tuban dan Tulungagung.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa data kuantitatif yang meliputi data alokasi DAK Pertanian, data Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian, data Melek Huruf (literasi) dan data persalinan didampingi tenaga ahli. Keseluruhan data diperoleh secara online dari website INDODAPOER Worldbank (Indonesia Database for Policy and Economic Research).

3.3. Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap variabel penelitian, maka variabel-variabel dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian adalah data alokasi Dana Alokasi Khusus bidang Pertanian dengan sumber data Kementerian Keuangan.
- 2) Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) khusus sektor pertanian dengan menggunakan harga konstan.
- 3) Tingkat Literasi (Melek Huruf) adalah persentase melek huruf untuk penduduk dengan usia 15 tahun ke atas. Variabel ini adalah variabel kontrol sebagai representasi sektor pendidikan.
- 4) Tingkat persalinan dengan didampingi tenaga ahli (*Birth*) sebagai *proxy* dari sektor kesehatan.

3.4. Model Penelitian

Pengembangan model penelitian didasarkan atas teori Federalisme fiskal dan studi penelitian serupa sebelumnya.

Penggunaan pertumbuhan produk domestik bruto sebagai variabel Y dan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel X utama mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya seperti Maryati dan Endrawati (2010) dan Nuryadin dan Suharsih (2017).

Sedangkan pemilihan variabel X kontrol mengikuti penelitian yang dilakukan Nobuo Akai et.al (2002) yang menggunakan variabel pendidikan sebagai variabel kontrol. Untuk variabel kesehatan sebagai variabel kontrol merujuk kepada studi yang dilakukan oleh Rajkumar dan Swaroop (2008).

Berdasarkan teori dan studi diatas maka model penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$\text{Growth}_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \text{DAKAGCR}_{ij} + \beta_2 \text{LIT}_{ij} + \beta_3 \text{BIRTH}_{ij} + \epsilon$$

Keterangan:

PPDB = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
DAKAGCR = Dana Alokasi Khusus Pertanian
LIT = Tingkat Literasi

BIRTH = Tingkat Persalinan dengan tenaga ahli
i = time identifier
j = area identifier
 ϵ = error term

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan hasil statistik uji regresi panel data. Uji regresi ditentukan melalui beberapa tahapan:

- 1) Melakukan regresi data dengan *Common Effect Model* (CEM) atau PLS
- 2) Melakukan regresi data dengan *Fixed Effect Model* (FEM)
- 3) Melakukan regresi data dengan *Random Effect Model* (REM)
- 4) Melakukan *Chow Test* untuk memilih antara CEM atau FEM (dengan hasil CEM)
- 5) Melakukan *Breusch Pagan-Lagrange Multiplier Test* untuk memilih antara CEM atau REM (dengan hasil CEM)

4.2. Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: GROWTH

Method: Panel Least Squares

Date: 01/13/20 Time: 00:01

Sample: 2006 2008

Periods included: 3

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24709.91	174849.7	0.1413210	0.8879
DAK	31083.29	10065.97	3.0879590	0.0026
LITERASI	-394.7986	1820.162	-0.2169030	0.8287
BIRTH	-0.050410	0.186379	-0.2704730	0.7873
R-squared	0.098939	Mean dependent var	86376.73	
Adjusted R-squared	0.074364	S.D. dependent var	149702.0	
S.E. of regression	144028.2	Akaike info criterion	26.62786	
Sum squared resid	2.28E+12	Schwarz criterion	26.72387	
Log likelihood	-1513.788	Hannan-Quinn criter.	26.66683	
F-statistic	4.026080	Durbin-Watson stat	3.041335	
Prob(F-statistic)	0.009259			

4.3. Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: GROWTH

Method: Panel Least Squares

Date: 01/13/20 Time: 00:04

Sample: 2006 2008

Periods included: 3

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	298648.5	912112.4	0.327425	0.7443
DAK	16470.62	18923.93	0.870359	0.3870

LITERASI	-3007.052	10480.36	-0.286923	0.7750
BIRTH	0.022770	0.236476	0.096288	0.9236
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.377532	Mean dependent var	86376.73	
Adjusted R-squared	0.036453	S.D. dependent var	149702.0	
S.E. of regression	146948.1	Akaike info criterion	26.90711	
Sum squared resid	1.58E+12	Schwarz criterion	27.89118	
Log likelihood	-1492.705	Hannan-Quinn criter.	27.30648	
F-statistic	1.106877	Durbin-Watson stat	4.401536	
Prob(F-statistic)	0.347455			

4.4. Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: GROWTH

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/13/20 Time: 00:05

Sample: 2006 2008

Periods included: 3

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 114

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24709.91	178394.4	0.138513	0.8901
DAK	31083.29	10270.03	3.026602	0.0031
LITERASI	-394.7986	1857.062	-0.212593	0.8320
BIRTH	-0.050410	0.190157	-0.265099	0.7914
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			146948.1	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.098939	Mean dependent var	86376.73	
Adjusted R-squared	0.074364	S.D. dependent var	149702.0	
S.E. of regression	144028.2	Sum squared resid	2.28E+12	
F-statistic	4.026080	Durbin-Watson stat	3.041335	
Prob(F-statistic)	0.009259			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.098939	Mean dependent var	86376.73	
Sum squared resid	2.28E+12	Durbin-Watson stat	3.041335	

Dari ketiga model tersebut, akan dipilih model mana yang paling sesuai dengan melakukan uji chow/hausman/Breusch Pagan-Legrange”.

4.5. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.883029	(37,73)	0.6552
Cross-section Chi-square	42.166447	37	0.2574

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: GROWTH

Method: Panel Least Squares

Date: 01/13/20 Time: 00:06

Sample: 2006 2008

Periods included: 3

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24709.91	174849.7	0.141321	0.8879
DAK	31083.29	10065.97	3.087959	0.0026
LITERASI	-394.7986	1820.162	-0.216903	0.8287
BIRTH	-0.050410	0.186379	-0.270473	0.7873
R-squared	0.098939	Mean dependent var	86376.73	
Adjusted R-squared	0.074364	S.D. dependent var	149702.0	
S.E. of regression	144028.2	Akaike info criterion	26.62786	
Sum squared resid	2.28E+12	Schwarz criterion	26.72387	
Log likelihood	-1513.788	Hannan-Quinn criter.	26.66683	
F-statistic	4.026080	Durbin-Watson stat	3.041335	
Prob(F-statistic)	0.009259			

Dengan nilai probabilitas sebesar 0.6552 yaitu bernilai lebih dari $\alpha=0.05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (H_0 adalah CEM dan H_1 adalah FEM). Jadi, model yang paling sesuai menurut uji chow adalah CEM. Selanjutnya akan dilakukan uji Breusch Pagan-Legrange untuk membandingkan antara CEM dan REM.

4.6. Uji Breusch Pagan-Legrange

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 01/13/20 Time: 00:01

Sample: 2006 2008

Total panel observations: 114

Probability in ()

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	0.276315 (0.5991)	6.569548 (0.0104)	6.845863 (0.0089)
Honda	-0.525657 (0.7004)	2.563113 (0.0052)	1.440699 (0.0748)
King-Wu	-0.525657 (0.7004)	2.563113 (0.0052)	2.377489 (0.0087)
GHM	--	--	6.569548 (0.0145)

Dengan nilai probabilitas lebih dari 0.05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (H_0 adalah CEM dan H_1 adalah REM). Sehingga model yang paling sesuai adalah Common Effect Model (CEM)".

4.7. Pembahasan dengan Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: GROWTH

Method: Panel Least Squares

Date: 01/13/20 Time: 00:01

Sample: 2006 2008

Periods included: 3

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24709.91	174849.7	0.141321	0.8879
DAK	31083.29	10065.97	3.087959	0.0026
LITERASI	-394.7986	1820.162	-0.216903	0.8287
BIRTH	-0.050410	0.186379	-0.270473	0.7873
R-squared	0.098939	Mean dependent var	86376.73	
Adjusted R-squared	0.074364	S.D. dependent var	149702.0	
S.E. of regression	144028.2	Akaike info criterion	26.62786	
Sum squared resid	2.28E+12	Schwarz criterion	26.72387	
Log likelihood	-1513.788	Hannan-Quinn criter.	26.66683	
F-statistic	4.026080	Durbin-Watson stat	3.041335	
Prob(F-statistic)	0.009259			

- 1) R-square: nilainya lebih dari 0.05, maka kemampuan variable predictor kuat dalam menjelaskan variable respons. **Variasi seluruh variable bebas (DAK, literasi, tingkat persalinan) dapat mempengaruhi variable terikat (growth) sebesar 9.9% (0.098939). Sedangkan sisanya sebesar 90.1% (0.901061) dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian.**
- 2) Pro (F-statistics): nilainya kurang dari 0.05, maka menerima H_1 atau berarti bahwa pengaruh simultan variable predictor terhadap variable respons terbukti bermakna secara statistic. **DAK, literasi, dan tingkat persalinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB**
- 3) Persamaan yang didapatkan dari uji tersebut adalah:

$$Y (\text{growth}) = C + \text{DAK} (X_1) - \text{LITERASI} (X_2) - \text{BIRTH} (X_3)$$

$$Y (\text{growth}) = 24709.91 + 31083.29 (X_1) - 394.7986 (X_2) - 0.050410 (X_3)$$

Dari persamaan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Pengaruh DAK berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi
- Pengaruh literasi berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi

- Pengaruh tingkat kelahiran berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Bruto khusus sektor pertanian serta menganalisis faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan PDB sektor pertanian di wilayah tertentu. Berdasarkan hasil pengujian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, beberapa simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. DAK Pertanian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB dari sektor pertanian, Hasil pengujian model diatas menyimpulkan bahwa setiap pertambahan 1% DAK Pertanian mempengaruhi pertumbuhan PDRB sektor pertanian sebesar 0.99%.
2. Tingkat literasi dan tingkat persalinan dengan dibantu tenaga medis memiliki pengaruh berlawanan terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian. Namun hasil ini belum menunjukkan hubungan yang signifikan sehingga simpulan atas kedua variabel ini masih perlu diuji lebih lanjut.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Agar salah satu tujuan desentralisasi fiskal pada sektor pertanian dapat tercapai maka program penyaluran Dana Alokasi Khusus pertanian yang saat ini telah teruji berdampak baik, tetap dilaksanakan dengan penajaman aspek-aspek terukur seperti jumlah sarana dan prasarana sektor pertanian, kuantitas dan kualitas petani yang dibina serta luasan area pertanian yang dikembangkan. Intinya program-program yang dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian, perbaikan sarana prasarana pertanian dan kesejahteraan petani.
2. Kemampuan pendidikan dan kesehatan manusia dalam pengelolaan pembangunan daerah sektor pertanian memiliki peranan vital. Sehingga pembinaan sumber daya manusia sebagai faktor pelaku pembangunan pertanian mutlak dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Candra Fajri Ananda: Bagaimana DAK; <https://feb.ub.ac.id/bagaimana-dak.html> , 2019

- Dewi Irma Septiyani Paulus, Rosalina A.M. Koleangan, Daisy S.M. Engka: Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemiskinan melalui belanja daerah di kota Bitung; Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Vol 19, No 2 (2017)
- D. Nuryadin dan S. Suharsih (2017): Analisis dan Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus terhadap Indikator Kinerja Pembangunan di Daerah Studi Kasus Kabupaten-Kota 2003-2013, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan 18 (1), 62-70
- H. P.S.Rachman, Sri Hastuti Suhartini, dan G.S. Hardono; Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional; Pengembangan Inovasi Pertanian 1(1), 2008, 47-55
- Iwan Hermawan; Analisis Perdagangan Beras dan Ketahanan Pangan di Negara-Negara Asia Tenggara; Politica Vol. 4 No. 2 November 2013, 157-195
- Jolianis Koto (2016): Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening, *ECONOMICA Journal of Economic and Economic Education* Vol.4 No.2 (192-209)
- Maryati, Ulfi dan Endrawati: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat: jurnal akuntansi & manajemen, 5 (2). Pp. 68-84.2010; Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 1, April 2014, hlm.12-22
- Nobuo Akai dan Masayo Sakata (2002); Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States; *Journal of Urban Economics* 52 (2002) 93–108
- Rajkumar dan Swaroop (2008); Public spending and Outcomes: Does governance matter? ; *Journal of Development Economics* 86 (2008) 96–111
- Setiyawati dan Hamzah (2007): Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Pendekatan Analisis Jalur *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Desember 2007, Vol.4, No. 2, hal. 211-228